

Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah (Studi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonomi Baru)

Ambya, I Wayan Suparta, Wulandari Ekita Putri

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Local Taxes, Regional Retributions, and Profit Sharing on Fiscal Capacity of new parent regions and autonomous regions, and show the difference between the fiscal capacity of parent regions and new autonomous regions (DOB), the sample in this study is Central Lampung District as the parent region And Regency of East Lampung and Metro City as the area of expansion.

The results of this study show that local tax variables have a negative and significant influence, both in short-run (short-run), as well as in the long-run (long-run), while the variable levy area has a positive influence and not significant to fiscal capacity, Tax Sharing shares have a positive and significant impact on fiscal capacity, both short-run, and long-run. The DOB dummy variable from panel data regression estimation was found between parent regions (Central Lampung District) and DOB (Metro City and East Lampung District) no difference to Fiscal Capacity.

Keywords: Fiscal Capacity, New Autonomous Region (DOB), Local Taxes, Local Retributions and Profit Sharing Taxes.

Pendahuluan

Diberlakukannya otonomi daerah telah memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. (Khusaini, 2006).

Kemandirian daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya (Halim, 2007). Kemandirian suatu daerah

dapat dilihat dari kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut, semakin besar kontribusi kapasitas fiskal terhadap penerimaan daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai seluruh urusan. (Kurniasih, 2011).

Secara umum besarnya DAU untuk tiap daerah ditentukan sama besarnya oleh besaran *fiscal gap*, yaitu selisih antara kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan fiskal, dengan kata lain defisit anggaran daerah. (Bird and Villancourt, 2000).

Solusi untuk kesenjangan fiskal adalah memperbanyak kapasitas fiskal. Ide dasarnya adalah untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif lebih besar dibanding kebutuhan fiskalnya, maka DAU yang dialokasikan seyogyanya tidak terlalu besar. Sebaliknya daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif lebih tinggi terhadap kapasitas fiskalnya, membutuhkan DAU yang relatif besar pula agar mereka tetap dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. Jadi kapasitas fiskal ini dapat dianggap sebagai wakil kemampuan suatu daerah di dalam melaksanakan semua kewenangan wajibnya dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah, maka semakin kuat kemampuan keuangan daerah (tingkat kemandirian daerah tinggi).

Studi mengenai hubungan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah diantaranya Allers, et.al (2010) menyatakan tidak ada perbedaan antara transfer pemerintah di Tanzania dengan kapasitas fiskal. Hal ini menyebabkan daerah yang kaya mampu menghasilkan pendapatan

perkapita dibandingkan di daerah miskin, sehingga pelayanan publik di daerah miskin sulit untuk dibiayai dan mengusulkan untuk mengukur kapasitas fiskal pemerintah daerah di Tanzania menggunakan data kemiskinan. Ukuran ini untuk mendapatkan pemerataan yang akan mendukung pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, berbeda dengan Chernick (1998) menyatakan bahwa kapasitas fiskal antar daerah di Kota New York memiliki banyak perbedaan. Kota New York memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi dibandingkan dengan kota lain seperti Connecticut dan New Jersey, hal ini dikarenakan adanya perbedaan realisasi pendapatan. kota lainnya sehingga kapasitas fiskalnya menjadi yang tertinggi.

Sejalan dengan Kurnia (2010) menyatakan bahwa 33 provinsi di Indonesia memiliki kesenjangan kapasitas fiskal, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi potensial. Penelitian ini juga menghitung kapasitas fiskal di era desentralisasi, hasil penelitiannya menunjukkan adanya penurunan kesenjangan kapasitas fiskal antar provinsi di Indonesia.

Penelitian ini didukung oleh Sriyana (2011) yang mengukur disparitas kapasitas fiskal di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya disparitas yang tinggi dan cenderung konstan selama 3 tahun antar kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Penelitian mengenai kapasitas fiskal yang menghubungkan dengan pertumbuhan ekonomi antara lain oleh Amelia (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berbeda dengan Veraningsih (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kapasitas fiskal. Sejalan dengan penelitian Haryanto (2003) yang mengukur kapasitas fiskal sebagai *proxy* kemandirian daerah dan dihubungkan dengan komponen PAD, hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) mempengaruhi kapasitas fiskal daerah secara signifikan,

sedangkan retribusi dan PDRB jasa tidak mempengaruhi kapasitas fiskal secara signifikan.

Kabupaten Lampung Tengah, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah memekarkan 2 (dua) kabupaten/kota Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro. Kondisi perekonomian dan banyaknya jumlah penduduk, banyaknya jumlah penduduk miskin dan besarnya total penerimaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupaten induk dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi DOB menunjukkan bahwa daerah pemekaran ternyata kondisi pertumbuhannya masih lebih rendah daripada kabupaten induk.

Tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dalam mengelola keuangan daerah masih tinggi, dimana rata-rata tingkat ketergantungan di atas 70 persen. Ini menunjukkan masih rendahnya kemandirian daerah baik di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur maupun di Kota Metro. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui Kapasitas Fiskal daerah sebagai pencerminan kemandirian daerah. Adapun variabel yang dipilih adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Bagi Hasil Pajak yang diyakini pada tahap awal sebagai *proxy* variabel yang mampu mencerminkan kemandirian daerah.

Dari berbagai data pada tabel di atas dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Otonomi Daerah adalah menjadikan daerah bersifat mandiri tidak tergantung pada pemerintah pusat, sehingga daerah diwajibkan untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang mandiri dan tidak tergantung dari pusat dapat dilihat pada kontribusi PAD dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Pada kenyataannya sumbangan PAD terhadap Total Pendapatan baik pada Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah induk dan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sebagai daerah

pemekaran jauh lebih rendah daripada sumbangan Dana Perimbangan.

2. Menurut UU No 33 Tahun 2004 Kapasitas Fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil pajak, dimana pajak daerah di kabupaten lampung tengah tertinggi bila dibandingkan dengan dua kabupaten pemekaran. akan tetapi berbeda bila dilihat pada rata-rata sumbangan pajak daerah terhadap PAD ternyata tertinggi pada Kabupaten Lampung Timur. Begitu pula pada Kota Metro rata-rata sumbangan retribusi Daerah terhadap PAD ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten induk.
3. Selain penerimaan pada PAD, pemerintah daerah juga mendapatkan alokasi dana perimbangan dari pusat, dalam penelitian ini fokus pada Dana Bagi Hasil Pajak. Dana perimbangan yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih banyak bergantung pada pemerintah pusat. dengan dua daerah lainnya.

Kajian Pustaka

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan, dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya (Bird and Vallaincourt, 2000: 15).

Desentralisasi fiskal adalah salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang mempunyai prinsip dan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Otonomi Daerah.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia, dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar (Haryanto, 2003).

Teori Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)

Hoessein (dalam Muluk, 2007) mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup dua elemen pokok. *Pertama*, pembentukan daerah otonom, dan *kedua*, penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut. Dari kedua elemen pokok tersebut lalu lahirlah apa yang

disebut sebagai *local government*, yang didefinisikan oleh *United Nations* sebagai: "*political subdivision of a nation (or in federal system state) which is constituted by law and has substansial control of local affairs, including the power to impose taxes or exproact labor for prescribed purposes The governing body of such an entity is elected or otherwise locally selected*". Seperti yang dikutip oleh Alderfer (dalam Muluk, 2007).

Pandangan Prasojo (2008), Nilai dasar dan tujuan pemekaran daerah pada hakekatnya bisa berada secara kontinum antara demokrasi lokal dan efisiensi-efektivitas pemerintahan. Jika demokrasi lokal menjadi nilai dasar dan tujuan pemekaran, pemekaran kabupaten/kota akan menjadi prioritas. Sebaliknya, jika nilai dasarnya adalah efisiensi-efektivitas pemerintahan, pemekaran kabupaten/kota harus dibatasi dan provinsi harus diperbanyak. Dalam pandangan Prasojo tersebut sejalan dengan Norton (Irfan: 2000) mengungkapkan bahwa penentuan batas kaitannya dengan daerah otonom harus mendasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Kombinasi diantara keduanya mempunyai arti

penting untuk menciptakan stabilitas dan *fleksibility & responsiveness*.

Secara lebih khusus, UU No. 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut : Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, wewenang menyelenggarakan urusan pemerintah, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, "Pembentukan daerah dapat berupa

beberapa penggabungan daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih". Dan ayat (4) menyebutkan, "Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan".

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah yang menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga diartikan sebagai sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD itu

menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Penerimaan Daerah

Secara umum sumber pendapatan daerah otonom adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Penerimaan pembangunan sebagai komponen yang bersumber dari pinjaman pemerintah daerah, dan Dana sektoral,

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sukirno, (2004) PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut. Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai

PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang profesional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur tentang dana perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik.

Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

Teori Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*)

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangannya yang diekspresikan dalam wujud kebutuhan fiskal tersebut, setiap daerah memiliki dan dibekali kapasitas keuangan. Secara umum, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya.

Di sebagian negara-negara maju, kapasitas fiskal diperkirakan dengan menggunakan basis pajak-pajak utama dan tingkat tarif pajak standar

(rata-rata). Menurut Kurniawan (2009), metode ini mengukur kapasitas fiskal suatu daerah dari penerimaan yang dapat dihimpun seandainya daerah tersebut memajaki semua basis pajak standarnya dengan upaya pajak (*tax effort*) yang standar pula.

Berdasarkan pada konsep Musgrave & Musgrave (1980) rumus Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*):

$$KF = \frac{\text{Jumlah PDRB} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Kapasitas fiskal Standar}} \times 100\%$$

$$KF_s = \frac{\text{Jumlah PDRB} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kab/Kota}}$$

Dimana:

- Kapasitas Fiskal adalah presentase dari PDRB perkapita dibagi dengan kapasitas fiskal standar.
- Kapasitas Fiskal Standar (KFs) adalah rata-rata kapasitas fiskal standar suatu daerah.

Metodologi Penelitian Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Provinsi Lampung dengan mengambil sampel 2 (dua) Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Kabupaten Induk sebagai pembanding. Daerah induk yang di jadikan sampel yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan DOB yaitu Kabupaten Lampung

Timur dan Kotamadya Metro dengan pertimbangan bahwa kedua kabupaten tersebut merupakan hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1999, periode pemerintahan yang lebih dari 10 tahun dan tidak mengalami pemekaran lagi seperti beberapa kabupaten lain di Provinsi Lampung.

Jenis dan Sumber Data

Menurut jenisnya, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan memiliki satuan hitung seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai publikasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti BPS, Bappeda, Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD), serta Dinas Pendapatan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa data yang terkait dengan

masalah keuangan daerah yang diperoleh dari publikasi Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJAPK) Kementerian Keuangan RI. Sementara itu untuk beberapa data yang terkait dengan masalah PDRB, PAD, DAU yang didapat dari instansi BPS Pusat serta data-data dari instansi terkait yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro.

Adapun periode penelitian sejak tahun 2001 hingga tahun 2010, dengan menggunakan data *cross section* yaitu 2 DOB ditambah 1 Kabupaten Induk. Pemilihan tahun 2001 dikarenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun APBD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk, dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota induk, sehingga tidak dimulai pada tahun awal pemekaran. Dari beberapa data yang didapat akan dilakukan suatu analisa untuk membuktikan variabel apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap kapasitas fiskal sebagai *proxy* kemandirian

daerah, serta membandingkan kapasitas fiskal antara kabupaten induk dan kabupaten pemekaran.

Model Analisis Analisis Ekonometrika

Penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrika yaitu regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Baltagi (2005) mengemukakan beberapa keunggulan dari penggunaan data panel dalam analisis ekonometrika yaitu, pertama mengontrol heterogenitas individu. Data panel menyatakan bahwa individu, perusahaan, tempat atau negara adalah heterogen.

Perumusan Model Penelitian

Model penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kapasitas Fiskal sebagai *proxy* kemandirian daerah antara Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan daerah pemekarannya yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro. Selain itu juga berdasarkan teori dalam Widarjono (2009) penelitian ini menggunakan model *fixed effect* dimana intersep berbeda antar kabupaten/kota, dengan metode teknik variabel

dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variables (LSDV)*.

Secara sistematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$KF = f(PD, RD, BHP, DOB) \dots\dots\dots 1$$

Dari persamaan 1 diperoleh:

$$KF = f(PD^{\beta_1} RD^{\beta_2} BHP^{\beta_3}, DOB^{\alpha}) \dots\dots\dots 2$$

Berdasarkan teori Widarjono (2009), penelitian ini menggunakan model full log (linier-log) maka persamaan 2 di turunkan dengan menggunakan *ln (logaritma natural)* sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln KF_{G_{it}} = \alpha_0 + \beta_1 \ln PD_{it} + \beta_2 \ln RD_{it} + \beta_3 \ln BHP_{it} + DOB_i + \varepsilon_t \dots\dots 3$$

Dimana :

LnKF : Kapasitas Fiskal sebagai *proxy* kemandirian daerah (persentase), *LnPD* : Pajak Daerah (Juta Rupiah), *LnRD*: Retribusi Daerah (Juta Rupiah),

LnBHP : Bagi Hasil Pajak (Juta Rupiah), *DOB* :

0 (Kabupaten Induk) ; 1

(Kabupaten/kota daerah pemekaran), α_0 : *Intersep* (konstanta), ε_t : *error term*

Hasil Dan Pembahasan

Estimasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kapasitas Fiskal di Lampung Tengah

Perkembangan fiskal yang ditunjukkan oleh tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal pemerintah daerah kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kotamadya Metro menunjukkan variasi yang cukup besar. Variasi tersebut menggambarkan bahwa kota/provinsi memiliki kemampuan berbeda-beda dalam meraih dan pendapatan asli daerah maupun dalam meraih dana transfer dari pemerintah pusat. Pada kenyataannya, kota/kabupaten memerlukan dana yang semakin besar untuk membiayai program-program pembangunannya. Sumber pembiayaan ini berasal dari dua sumber pokok, yaitu PAD dan dana perimbangan, yang bagian terbesarnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Namun dalam perkembangan terakhir dana DAU memegang peranan sekitar 85 persen dari total kebutuhan pendapatan APBD. Jika belanja daerah lebih besar dari PAD dan dana perimbangan, maka APBD

akan mengalami defisit yang pada umumnya dibiayai dengan SILPA dan utang. Oleh karena itu tinggi rendahnya PAD dan perimbangan, yang biasa disebut kapasitas fiskal, merupakan kunci pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Estimasi Model Penelitian dan Rancangan Uji

penelitian ini menggunakan model full log (linier-log) dengan menggunakan *ln* (*logaritma natural*) sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln KF_{Git} = \alpha_0 + \beta_1 \ln PD_{it} + \beta_2 \ln RD_{it} + \beta_3 \ln BHP_{it} + DOB_i + \varepsilon_t \dots 3$$

Dimana :

LnKF : Kapasitas Fiskal sebagai *proxy* kemandirian daerah (persentase); *LnPD* : Pajak Daerah (Juta Rupiah); *LnRD* : Retribusi Daerah (Juta Rupiah);

LnBHP : Bagi Hasil Pajak (Juta Rupiah); *DOB* = 0 bila kabupaten induk dan 0 bila kabupaten/kota hasil pemekaran (*DOB*); α_0 : *Intersep* (konstanta) ; ε_t : *error term*

Dari model ini akan dilakukan pengujian model *fixed effect* atau model *random effect*.

Uji Kesesuaian Model

Dalam metode panel data ada tiga metode yang digunakan yaitu

pooled least square, *fixed effect* dan *random effect*. Untuk mengetahui model yang akan dipilih antara *fixed effect* dan *random effect*, maka dapat dilakukan uji Hausman (*Hausman Test*). Uji Hausman ini dilakukan dengan mempergunakan alat bantu *software* program *Eviews* 8.

Statistik Uji F atau Chi-Kuadrat (Pooled Least Square vs Fixed Effect)

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.215239	(2,26)	0.0565
Cross-section Chi-square	7.293071		20.0261

Sumber : data diolah

Hasil tersebut menunjukkan baik F test maupun Chi-square signifikan (p-value 0,0261) lebih kecil dari 5%) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti *Fixed Effect*. Maka langkah selanjutnya melakukan pengujian *Hausman Test*

Random Effect Test

Untuk metode *Random Effect Test* tidak dapat dilanjutkan karena jumlah koefisien lebih besar dari

jumlah cross section, sehingga dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *Fixed Effect*.

Hasil Penghitungan Regresi

Setelah model persamaan regresi dinyatakan lolos uji identifikasi, proses selanjutnya adalah melakukan estimasi model panel data dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS), dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh hasil estimasi sebagai berikut: Tabel 4.1

Dari terlihat bahwa hanya variabel Retribusi Daerah (LNRD) yang signifikan pada taraf pada taraf 90% dengan tingkat determinasi R^2 sebesar 0,72529 atau 72,52% dan terjadinya indikasi autokorelasi hal ini terlihat kecilnya nilai DW sebesar 0,95658, sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model autoregresif tingkat pertama AR(1) yakni model regresi yang memaskukkan kelambanan (lag) variabel dependen sebagai

variabel independen. Menurut Widarjono (2013) menyatakan bahwa dampak dari setiap kebijakan ekonomi atau aktivitas ekonomi tidak terjadi secara instan tetapi memerlukan waktu atau kelambanan (lag), seperti kebijakan ekonomi seperti kebijakan moneter atau fiskal, dan lain-lain. (widarjono, 2013), maka model yang digunakan dalam penelitian ini menjadi :

$$\ln KF_{Git} = \alpha_0 + \beta_1 \ln PD_{it} + \beta_2 \ln RD_{it} + \beta_3 \ln BHP_{it} + DOB_i + (1-\delta)\ln KF_{t-1} + \varepsilon_t$$

Dimana :

$\ln KF$: Kapasitas Fiskal sebagai *proxy* kemandirian daerah (persentase); $\ln PD$: Pajak Daerah (Juta Rupiah); $\ln RD$: Retribusi Daerah (Juta Rupiah); $\ln BHP$: Bagi Hasil Pajak (Juta Rupiah); $\ln KF_{t-1}$: Kapasitas Fiskal periode sebelumnya; DOB: 0 bila kabupaten induk dan 1 bila kabupaten/kota hasil pemekaran (DOB); α_0 : *Intersep* (konstanta); ε_t : *error term*

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Panel Data dengan *Fixed Effect Model* dengan Pembobotan (*Cross Section Weight*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4,0597	0,3867	-10,4985	0,0000
DOB	0,0760	0,0758	1,0030	0,3251
LNPDP	0,0551	0,0486	1,1342	0,2671
LNRD	0,0845	0,0473	1,7867	0,0857
LNBHP	0,0561	0,0451	1,2444	0,2245
R-squared	0,72529			
Adjusted R-squared	0,66189			
Durbin-Watson stat	0,95658			

Sumber: data diolah

Dari model autoregresif tersebut, diperoleh estimasi regresi panel data

Tabel 4.2. Estimasi Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect* model autoregresif

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,3606	0,9062	-1,5014	0,1475
DOB	0,0050	0,0273	0,1827	0,8567
LNPDP	-0,0566	0,0326	-1,7398	0,0959
LNRD	0,0460	0,0300	1,5360	0,1388
LNBHP	0,0940	0,0503	1,8698	0,0749
LNKF(-1)	0,7862	0,1395	5,6369	0,0000
R-squared			0,8916	
Adjusted R-squared			0,8571	
Durbin-Watson stat			1,8242	

Sumber : data diolah ; lampiran 4

Pengujian Hipotesis Uji Parsial (Uji t-statistik)

Pengujian parsial (t-statistik) dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengujian regresi secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat ditampilkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 : Hasil Uji Parsial (Uji t-statistik)

Variabel Bebas	df=(n-k)	α	t-tabel	t-statistik	Kesimpulan
LNPDP	26	5 %	1,706	-1,740	Menerima H _a
LNRD	26	5 %	1,706	1,536	Menolak H _a
LNBHP	26	5 %	1,706	1,870	Menerima H _a

Sumber: Hasil olahan

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 3 variabel bebas 2 variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uji $t_{statistic}$ satu arah yaitu variabel pendapatan daerah (LNPDP) dan variabel Bagi Hasil Pajak (LNBHP) dimana $t_{statistik} > t_{tabel}$ pada tingkat kepercayaan $\alpha=5\%$, sedangkan variabel Retribusi Daerah (LNRD) tidak signifikan, terhadap kemandirian fiskal (LNCF)

Pengujian Hipotesis Masing-Masing Variabel Bebas Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Lampung Tengah

Pengujian hipotesis pada penelitian ini berdasarkan hasil estimasi regresi data panel yang diperlihatkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 .Hubungan dan signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Variable	Coefficient		Prob.	Hubungan yang ditemukan		Signifikansi (90%)
	Jangka Pendek	Jangka Panjang		Jangka Pendek	Jangka Panjang	
C	-1,3606	-6,3655	0,1475	Negatif(-)	Negatif(-)	Tidak Signifikan
DOB	0,0050	0,0233	0,8567	Posifit(+)	Posifit(+)	Tidak Signifikan
LNPD	-0,0566	-0,2650	0,0959	Negatif(-)	Negatif(-)	Signifikan
LNRD	0,0460	0,2153	0,1388	Posifit(+)	Posifit(+)	Tidak Signifikan
LNBHP	0,0940	0,4397	0,0749	Posifit(+)	Posifit(+)	Signifikan
LNKF(-1)	0,7862		0,0000			
intersep Dummy Jangka Pendek				Intersep Dummy Jangka Panjang		
Induk	-1,3606			Induk	-6,3655	
DOB	-1,3557			DOB	-6,3422	

Sumber : hasil olahan

Dari Hasil Estimasi diperoleh persamaan sebagai berikut:

Untuk daerah induk (Kabupaten Lampung Tengah) :*[†]

a. Jangka Pendek : $LNKF = -1,3606 + 0,0050*DOB - 0,0566*LNPD + 0,0460*LNRD + 0,0940*LNBHP + 0,7862*LNKF(-1)$

b. Jangka Panjang : $LNCF = -6,3655 + 0,0233*DOB - 0,2650*LNPD + 0,2153*LNRD + 0,4397*LNBHP + 0,7862*LNKF(-1)$

Untuk daerah pemekaran (DOB) yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro :

a. Jangka Pendek : $LNKF = -1,3557 + 0,0050*DOB - 0,0566*LNPD + 0,0460*LNRD + 0,0940*LNBHP + 0,7862*LNKF(-1)$

b. Jangka Panjang : $LNKF = -6,3422 + 0,0233*DOB - 0,2650*LNPD + 0,2153*LNRD + 0,4397*LNBHP + 0,7862*LNKF(-1)$

Dengan Nilai $R^2 = 0.891591$ atau 89,15 %

Hasil estimasi Tabel 4.4 meunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah (*LNPD*) tidak sesuai dengan hipotesis, yakni memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen terhadap kapasitas fiskal .

Besaran koefisien regresi sebesar negatif 0,0566, angka tersebut memberikan arti bahwa apabila pajak daerah naik 1% maka kapasitas fiskal akan menurun sebesar 0,0566 persen. Sifat koefisien regresi tersebut adalah inelastis, baik dalam jangka pendek maupun untuk jangka panjang, hal ini memberikan arti bahwa tinggi

rendahnya penerimaan dari pajak daerah tidak begitu berpengaruh terhadap kapasitas fiskal di daerah tersebut.

Variabel Retribusi Daerah (LNRD) juga bertentangan dengan hipotesis, di mana variabel Retribusi Daerah (LNRD) memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan baik dengan tingkat kepercayaan 95 atau 90 persen terhadap kapasitas fiskal. Besaran koefisien regresi sebesar 0,0460. Sedangkan variabel bebas Bagi Hasil Pajak (LNBHP) sesuai dengan hipotesis, dimana variabel bebas Bagi Hasil Pajak (LNBHP) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen terhadap kapasitas fiskal.

Besaran koefisien regresi sebesar 0,0940, di mana angka tersebut memberikan arti bahwa apabila bagi hasil pajak naik 1% maka kapasitas fiskal akan naik sebesar 0,0940 persen. Sifat koefisien regresi tersebut adalah inelastis, baik dalam jangka pendek maupun untuk jangka panjang, hal ini memberikan arti bahwa tinggi penerimaan dari bagi hasil pajak, tidak mempengaruhi bahwa daerah tersebut akan mandiri dari sisi keuangan daerah (tidak

berpengaruh terhadap kapasitas fiskal) di daerah tersebut.

Perbedaan kapasitas fiskal antara daerah induk dan DOB dalam penelitian ini, digunakan variabel dummy, diperoleh hasil Prob. sebesar 0,8567 dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha=5\%$), karena nilai tersebut $< 0,05$, maka variabel ini berada pada daerah tolak H_a atau terima H_0 , sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak adanya perbedaan antara daerah induk (Kabupaten Lampung Tengah) dan DOB (Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur dalam Kapasitas Fiskal.

Uji F-Statistik

Pengujian F-statistik menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat, diperlihatkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 : Hasil Uji F-Statistik

Df=(k-1;n-k-1)	α	F-tabel	F-Statistik	Kesimpulan
(3;26)	1 %	4,64	25,84781	Menerima H_a

Sumber: Hasil olahan

*Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah
(Studi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonomi Baru)*

Dari hasil Tabel 4.5 diperoleh nilai F-statistik sebesar 25,84781. Nilai F-statistik ini lebih besar dibandingkan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi (α) 1%, sehingga H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Daerah (LNPD), variabel Retribusi Daerah (LNRD), variabel Bagi Hasil Pajak (LNBHP) serta variabel *dummy* DOB (DOB) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal.

Penafsiran Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil koefisien determinasi dari model adalah sebesar 0,8916. Hal ini berarti 89,16% perubahan Kapasitas Fiskal di DOB di Provinsi Lampung dapat dijelaskan oleh variabel penentu dalam model, sedangkan sisanya 10,84% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Analisis Intersep Model Regresi *Fixed Effect*

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat nilai koefisien *fixed effect* berdasarkan hasil estimasi regresi model penelitian, di mana diperoleh intersep kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur memiliki efek intersep positif

dan Kota Metro memiliki efek intersep negatif

Tabel 4.6. Nilai Koefisien *Fixed Effect* Pada Intersep Tiap Kabupaten/ Kota

No	Kabupaten/Kota	Nilai Efek Pada Intersep
	Lampung Tengah	0.031121
	Lampung Timur	4.71E-05
	Metro	-0.031169

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 4.6, terdapat perbedaan kemampuan antara kabupaten dan kota dalam penelitian ini. Hal ini tercermin baik kabupaten induk atau Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah pemekaran/DOB memiliki nilai intersep positif atau sebesar 0.031121 dan 4.71E-05, sedangkan Kota Metro sebagai daerah pemekaran (DOB) memiliki nilai intersep negatif dengan besaran intersep -0.031169.

Hal ini berbeda dari hasil temuan yang dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Tahun 2005, yang menyatakan bahwa daerah kota dan daerah sekitar perkotaan cenderung memiliki basis ekonomi yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah kabupaten yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Penduduk

perkotaan memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis ekonomi dan pembahasan tentang kapasitas fiskal di Kabupaten Lampung Tengah, estimasi model *Ordinary Least Square* (OLS) dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pajak Daerah (LNPD) memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90%, baik dalam jangka pendek (*short-run*), maupun dalam jangka panjang (*long-run*), Retribusi Daerah (LNRD) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kapasitas fiskal baik tingkat kepercayaan 95 persen atau 90 persen. Besaran koefisien regresi dalam jangka pendek (*short-run*) sebesar 0,0460 dan untuk jangka panjang (*long-run*) $0,0460/(1-0,7862) = 0,2153$.

Sedangkan Bagi Hasil Pajak (LNBHP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal dengan tingkat kepercayaan 90 persen, dengan besaran koefisien regresi jangka pendek (*short-run*) sebesar 0,0940 dan untuk jangka panjang (*long-run*)

$0,0940/(1-0,7862) = 0,4397$ Angka tersebut memberikan arti bahwa dalam jangka pendek jika Bagi Hasil Pajak naik 1% maka Kapasitas Fiskal akan meningkat sebesar 0,0940 persen atau meningkat sebesar 0,4397 persen dalam jangka panjang.

Variabel dummy DOB dari estimasi regresi data panel diperoleh Prob. sebesar 0,8567 dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha=5\%$), karena nilai tersebut $< 0,05$, maka variabel ini berada pada daerah tolak H_a atau terima H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan antara daerah induk (Kabupaten Lampung Tengah) dan DOB (Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur dalam Kapasitas Fiskal.

Daftar Pustaka

- Allers, Maarten A. and Lewis J. Ishemoi. 2010. *Fiscal capacity equalisation in Tanzania*. University of Groningen, the Netherlands The Institute of Finance Management, Dar es Salaam, and University of Groningen, the Netherlands.
- Baltagi, B. H. (2003). *Econometric Analysis of Panel Data*, Second edition, New York: John Wiley&Son, Ltd, Chicester.

*Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah
(Studi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonomi Baru)*

- Bird, Richard M. and Francois Vaillancourt. 2000. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press.
- BPS Lampung : PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan
- Chernick, Howard. 1998. "Fiscal Capacity in New York: the city Versus the region". National Tax Journal. Vol. 51 No. 3 (September) pp. 531-40
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007), Jurnal Ilmiah "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", Makassar : Simposium Nasional Akuntansi X
- Gozali, A. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Birokrasi Ekonomi Sosial*. Pattimura, L. [editor]. Pustaka LSKPI, Jakarta.
- Hadi, Sumarsono. 2009. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah : Kasus Kota Malang (1999-2004)*. JESP Vol.1, No. 1, 2009.
- Halim, Abdul. dan Damayanti, T. W. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Jogjakarta.
- Haryanto, J. T. 2006. "Kemandirian Daerah : Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis". <http://www.fiskaldepkeu.go.id/kemandiriandaerah.pdf>. [3 Juli 2008].
- Hofman, B., Kadjatmiko, Kaiser, K., dan Sjahrir, B.S. 2006. Evaluating Fiscal Equalization in Indonesia. *World Bank Policy Research Working Paper 3911*, May.
- Huda, Nurul. 2011. *Analisis PAD terhadap Kemandirian Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2011*. Fakultas Ekonomi.
- Khusaini, Mohammad .2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFU Unibraw, Malang.
- Kuncoro, Mudrajat. 2012. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Penerbit: Salemba Empat.
- Kurniasih, Yani. 2011. *Strategi Meningkatkan Kapasitas Fiskal (Pajak Daerah) di Pemerintah Daerah Kota Bogor (studi kasus dispenda kota bogor)*. Program Manajemen Pembangunan Daerah, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

*Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah
(Studi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonomi Baru)*

- Ladjin, Nurjana. 2008. *Analisis kemandirian fiskal Di Era Otonomi Daerah (studi kasus di propinsi sulawesi tengah)*. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Mardiasmo, 2005. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mahi, Raksaka et al. *Fiscal Decentralizations : Its Impact on Cities Growth*. Jakarta : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 2, No. 1, Juli 2001
- Marta, M. Fajar dan Yulvianus Harjono : *Otonomi daerah Lampung (6) : Pemekaran Masihkah Perlu?* : www.ulunlampung.blogspot.com/2011.
- Musgrave & Musgrave, 1980. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Nasir, M. Masbar, R. Dan Yefirson. 2015. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Induk Dan Kabupaten Pemekarannya Di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol.3. No. 1. pp. 47- 56
- Novalistia, R. Rizka. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014). *Journal Of Accounting*, Vol. 2 No.2
- Simanjutak, Robert, A. 1990. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Flatron Untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia, Padang.
- Sriyana, Jaka. 2011. *Disparitas Fiskal Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.56-66
- Subagyo, Herry. 2003. *Pengembangan Ekonomi Rakyat di Era Otonomi Daerah*. Artikel Th. I No.11 Januari 2003, Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Todaro, M.P. dan Smith S.C, 2004. *Pembangunan di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa Harris Munandar dan Puji A.L. Erlangga.
- Triastuti, Darwin M. dan Ratminto. 2005. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jogjakarta. *Jurnal Sosio Sains*, volume 18 No. 2, April 2005 : 293-310.
- Yendrik, Yon. 2009. *Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Undang-Undang

UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah

UU No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Daerah

UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pendapatan Pajak dan
Retribusi Daerah

Peraturan-Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006
tentang "*Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah*"

Peraturan Pemerintah Nomor 66
tahun 2001 tentang "*Retribusi
Daerah*"

Peraturan Menteri Keuangan RI No.
226/PMK.07/2012 tentang
*Penetapan Peta Kapasitas
Fiskal Propinsi dan
Kabupaten/Kota Indonesia,*
Jakarta

Ambya, I Wayan Suparta, Wulandari Ekita Putri

*Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah
(Studi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonomi Baru)*